

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta, Media Sara Press, 1987.
- Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Malang, Averroes Press, 2005.
- Aidul Fitriyada Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis menurut Konstitusi*, Surakarta, UMS Press, 2009.
- Ammiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2003.
- Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, KRHN, 2005.
- Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, 2007.
- Didik R. Usop, dkk. *Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara*, Balitbang Kota Palangkaraya, 2018.
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Batam, *Badan Otorita Batam*, Batam, Sistem Informasi Kearsipan Nasional.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, Nusamedia, 2007.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, 2016.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*, Cet. 1, Yogyakarta, Penerbit WR, 2016.
- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Press, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Ihtiar Baru van Hoeve, 1994.

- \_\_\_\_\_, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Konsitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretariat dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuna Ilmu Populer, 2007.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa V*, Jakarta, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016.
- Muhadam Labolo dan Ahmad Averus Toana, *Relokasi Ibu Kota Negara (Studi Alternatif)*, Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2022.
- M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*, Jakarta, Rajawili Pers, 2016.
- M. Rusli Karim, *Negara: Suatu Analisis Mengenai Asal-Usul dan Fungsi*. Yogyakarta, Tiara Wacana, 1997.
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Rajawali Press, 2012.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media, 1999.
- Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta, Sekjen MK, 2010.
- Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta, Sinar Harapan, 1986.
- Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara: Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum*, Malang, Setara Press, 2016.
- Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Cet. 1, Bandung, Pustaka Setia, 2013.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusamedia, 2009.

- \_\_\_\_\_, *Ilmu Negara*, Jakarta, Raja Grafindo, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Kajian Terhadap Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta*, Jakarta, Nusamedia, 2021.
- Padmo Wahyono, *Masalah-Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Puslit IAIN, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta, IAIN Jakarta Press, 2000.
- Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonom Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang, Unissula Press, 2019.
- Sunarso, *Membedah Demokrasi*, Edisi I, Yogyakarta, UNY Press, 2015.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers, 2020.
- Universitas Negeri Surabaya, *Bunga Rampai Isu Otonomi Daerah: Memahami Jakarta Secara Khusus (Sebuah Deskripsi Praktik Otonomi Khusus di Propinsi DKI Jakarta)*, Surabaya, Unesa University Press, 2020.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2021

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*. Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Pemerintah Daerah*, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, LN No. 58 Tahun 2015, TLN No. 5679.
- Indonesia, *Undang-Undang Ibu Kota Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, LN No. 41 Tahun 2022, TLN No. 6766.
- Indonesia, *Perpres Otorita Ibu Kota Nusantara*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, LN. No. 102.
- Indonesia, Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

### C. Jurnal/Artikel Ilmiah

Ade Kosasih, *Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis*, Al-Imarah; Jurnal Pemerintahan dan Politi Islam, Vol. 2, No. 1, 2017.

Ardilafiza, dkk, *Kedudukan dan Karakteristik Peraturan Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 3, September 2022.

Arfa'i, *Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmu Hukum: Inovatif, Vol. 6, No. 7, Maret 2015.

Budiyono, *Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat*, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013.

Desy Mutia Ali, *Implementasi Sistem Merti pada Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Dalam Kepegawaian di Indonesia*, Badan Kepegawaian Negara, Oktober 2019.

Fanisa Luthfia Putri Erwanti dan Waluyo, *Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1, No. 1, 2022.

Fikri Hadi dan Farina Gandtyani, *Konsititusalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 52, No. 1, Tahun 2022.

Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 3, September 2020.

Gunawan A. Tauda, *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Vol. 1, Edisi 4, November 2018.

Hasan Supriadi, *Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia*, Jurnal Agregasi, Vol. 6, No. 2, November 2018.

J. W. Salamony, *Tinjauan Perubahan Nomenklatur Kepala Daerah Menjadi Kepala Otorita Pada Ibu Kota Negara Indonesia (Studi Terhadap*

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara), Jurnal Ikamakun, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Jean Bodin dalam Mohammad Yuhdi, *Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pascara Perubahan UUD NRI 1945*, Jurnal Hukum Maksigama, No. 1, Mei 2016.
- Kementerian PPN/Bappenas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*, Jakarta, PPN/Bappenas, 2020.
- Kiki Endah, *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2. Mei 2016.
- Laode Harjudin dkk, *Menggugat Penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat*, Jurnal Publicuho, Vol. 5, No. 4, Januari 2022.
- Lustfi M. dan Anugerah A.S, *Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia (Tinjauan Geografi)*, Yogyakarta, BPPG, 2019.
- M. Rizki Nurdin, *Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kta Nusantara*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 7, No. 3, Juli 2022.
- Mexsasai Indra, *Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Selat, Vol. 1, No. 2, Mei 2014.
- Muhammad Zaenuddin, dkk, *Dualisme Kelembagaan Natara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian di Kota Batam*, Jurnal of Business Administration Vol. 1, No. 2, September 2017.
- Nany Suryawati, *Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi*, Jurnal Sependikum, Maret 2018.
- Riyan Afrianto dan Eko Prasajo, *Analisis Proses Pengisian Jabtan Administrasi Berbasis Merit System di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*, Jurnal Reformasi Administrasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020.
- Sodikin, *Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Cita Hukum, Vo. 1 No. 1., Juni 2014.
- Sunarto, *Prinsip Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, No. 2, April 2016.

Wahyu Laksana Mahdi, *Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 10, Oktober 2022.

Wiky Witarni, *Transisi Pemandahan Ibu Kota Negara*, Majalah Simpul Perencanaan, Vol. 42, Tahun 2022.

#### **D. Sumber Lain**

Rofiq Hidayat, *Pengaturan Sistem Otorita dalam UU IKN Dinilai Langgar Konstitusi*, berita online pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sistem-otorita-dalam-uu-ikn-dinilai-langgar-konstitusi-1t61e92c59b51e0?page=all>, diakses 15 April 2022.

Matius Alfons, *KSP Ungkap Alasan Jokoqi Pilih Kepala Otorita IKN dari Non Partai*, berita dari detikNews, terbit pada Rabu 23 Februari 2022, diakses melalui link <https://news.detik.com/berita/d-5954572/ksp-ungkap-alasan-jokowi-pilih-kepala-otorita-ikn-dari-non-partai> pada 12 April 2023, pukul 21:31 WITA.

Kanavino Ahmad Rizqo, *KSP: Bambang Susanto Ahli Infrastruktur, Dhony Rahajoe Pengalaman Kelola BSD*, berita dari detikNews, terbit pada Kamis 10 Maret 2022, diakses melalui link <https://news.detik.com/berita/d-5976698/ksp-bambang-susantono-ahli-infrastruktur-dhony-rahajoe-pengalaman-kelola-bsd> pada 12 April 2023, pukul 21:38 WITA.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan)*, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan pada link [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en) diakses pada 19 April 2023, Pukul 21.23 WITA.